

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang industri (revolusi industri) melahirkan tatanan dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi terfokus pada keuntungan perseorangan dan bukan lagi pada kebaikan bersama, melainkan mengarah kepada kaum pemilik modal (Kapitalis). Kaum pemilik modal ini memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri dan memperkuat kedudukan ekonomi dan akibatnya menimbulkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan serta kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Gerakan koperasi dunia dimulai awal abad ke-19 di Inggris. Awal mulanya koperasi dimulai dari munculnya revolusi industri. Penemuan baru yang terjadi dalam lapangan industri mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat besar. Banyak hal yang dulunya dikerjakan oleh manusia kini dapat dikerjakan oleh mesin. Akibat dari perubahan itu banyak masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah mengalami penderitaan. Adanya revolusi industri ini hanya menguntungkan atau menguatkan kelompok pemilik modal untuk menguasai semua kehidupan masyarakat. Akibat dari perkembangan itu, golongan masyarakat lemah semakin terdesak kebutuhan ekonominya, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup dalam penderitaan atau mereka terjebak dalam situasi kemiskinan.

Dari awal dibentuknya koperasi yang ada di Inggris telah memiliki tujuan mulia untuk menyelamatkan masyarakat yang menderita. Dalam perjalanan selanjutnya koperasi pun berkembang dan bahkan hampir semua negara di dunia ini, baik negara maju maupun negara berkembang percaya pada organisasi

koperasi. Indonesia yang merupakan negara berkembang juga membangun dan menghidupkan organisasi koperasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang menderita atau masyarakat yang selalu hidup dalam kemiskinan. Dalam perkembangannya ada berbagai jenis koperasi, ada koperasi konsumen, koperasi kredit, koperasi jasa dan koperasi produsen dan dalam pelaksanaannya, koperasi memiliki nilai-nilai, prinsip, tujuan dan asas yang dihidupkan dalam koperasi itu sendiri. Semuanya itu merupakan pedoman dalam membangun perusahaan koperasi yang handal.

Masalah kemiskinan sampai dengan saat ini sudah menjadi masalah pembangunan yang bersifat multidimensi, termasuk di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki jumlah penduduk miskin yang begitu banyak dan karena jumlahnya yang banyak, maka perlu adanya perhatian secara serius dalam mengatasi kemiskinan serta mencari jalan keluarnya. Mengenai masalah kemiskinan di Indonesia dapat diketahui dengan adanya kondisi yang dialami oleh masyarakat sendiri seperti, kondisi keterbelakangan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dari sisi ekonomi serta banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran yang menjadi sebab masyarakat hidup dalam kemiskinan. Mengenai kemiskinan di Indonesia, ada beberapa kategori kemiskinan yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut dan kemiskinan struktural

Latar belakang hadirnya wacana ekonomi kerakyatan ialah adanya situasi krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi disebabkan oleh sistem kapitalisme neoliberal di berbagai negara. Adanya krisis ekonomi ini telah mengakibatkan banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan dan dalam mengatasi masalah tersebut para pendiri bangsa Indonesia berupaya untuk mencari jalan keluar. Dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut, maka muncul gagasan ekonomi kerakyatan yang memihak kepada masyarakat miskin dan secara historis gagasan ekonomi kerakyatan dibangun atas kesadaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang terkucilkan di bawah kolonialisme. Sekitar 75 tahun yang lalu para pendiri bangsa Indonesia sudah memikirkan bagaimana melindungi, memajukan dan menyejahterakan rakyat

Indonesia melalui kedaulatan dalam bidang ekonomi. Adanya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini merupakan sebuah patokan untuk pembangunan negara Republik Indonesia dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap tepat, untuk mengelola ekonomi sesuai kemampuannya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

Tujuan utama ekonomi kerakyatan dalam garis dasar meliputi tersedianya peluang kerja dan terciptanya kehidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Terselenggaranya sistem jaminan sosial ditujukan secara khusus bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pendistribusian kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat, terselenggaranya pendidikan nasional dengan memberikan bantuan cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat, dan terjaminnya kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat untuk mendirikan serta menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Ekonomi kerakyatan mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi di Indonesia. Dalam sistem dan strukturnya, ekonomi kerakyatan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan memiliki peran penting dalam pembangunan untuk kemakmuran masyarakat seperti, rakyat secara partisipatoris-emosipatoris berkesempatan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif, pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan secara bersama-sama. Pembangunan perekonomian rakyat sebuah usaha untuk mempertahankan daulat rakyat dan bukan daulat pasar dan usaha itu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Wadah ekonomi rakyat yang sangat sesuai dengan anjuran Undang-Undang Dasar 1945 adalah koperasi. Koperasi sebagai organisasi yang menampung banyak orang miskin, dengan asas kekeluargaan, kerja sama, gotong-royong akan mampu menjadi wadah ekonomi untuk berusaha menciptakan

kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya dan anggota koperasi khususnya. Usaha koperasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat luas ialah dengan memberikan pinjaman uang kepada anggota dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dari anggota atau keperluan dari anggota dan masyarakat luas. Lembaga koperasi memiliki peran yang sangat penting untuk membantu anggota dalam memproduksi hasil usaha dari anggota koperasi itu sendiri. Koperasi dapat menangani hasil produksi anggota dengan sebaik mungkin, agar anggota koperasi merasa puas dan hasil produksi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh anggota koperasi dengan harga yang relatif tinggi. Koperasi akan mengatur dan mengelola pemasaran hasil produksi anggota. Hal yang bisa dilakukan oleh lembaga koperasi ialah, Pertama, memberikan informasi pasar yang akurat dan cepat pada anggota, sehingga anggota mengetahui harga jual, kualitas dan jenis barang yang dibutuhkan konsumen. *Kedua*, memberikan penyuluhan atau pembinaan pada anggota koperasi sebagai produsen agar tidak hanya bergantung atau menghasilkan satu produk saja, melainkan mengembangkan dengan berbagai produk yang dibutuhkan di pasar.

Koperasi sebagai sarana dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, maka hal yang dilakukan koperasi ialah dengan berupaya meningkatkan produksi rakyat di daerah pedesaan dengan membangun koperasi pertanian. Koperasi memberikan bantuan-bantuan berupa alat yang dibutuhkan oleh petani dan memberikan pinjaman berupa uang untuk mengembangkan usaha dari para anggota khususnya. Lebih jauh koperasi selalu berusaha untuk menjadikan koperasi yang berinovasi dalam artian, koperasi bisa menghasilkan produk-produk yang berbeda dan berkualitas serta memiliki nilai guna yang tinggi dan bisa digunakan oleh banyak orang. Adanya produk-produk yang berkualitas dihasilkan oleh koperasi, maka koperasi juga membantu memasarkan produk tersebut dengan harga yang tinggi agar bisa meraih keuntungan lebih dan menjadikan itu sebagai sumber pemasukan bagi anggota dan masyarakat umumnya.

Pencapaian koperasi sebagai sokoguru perekonomian tentunya melalui partisipasi aktif dari masyarakat secara umum dan para anggota khususnya. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan anggota koperasi, maka koperasi akan

menjadi sulit menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan sistem ekonomi kerakyatan tidak direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, peran koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan tidak terlepas dari partisipasi yang aktif dari masyarakat dan anggota koperasi. Dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat sendiri dan anggota koperasi maka koperasi dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dan dengan demikian koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional.

## **5.2 USUL DAN SARAN**

### **5.2.1 Lembaga Koperasi**

Koperasi sebagai organisasi perkumpulan masyarakat miskin yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan dan anjuran Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap mampu menjaga identitas agar koperasi tidak kehilangan jati dirinya sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Di era modern seperti sekarang ini, koperasi harus mampu mempertahankan identitasnya dengan tetap mengikuti nilai-nilai, prinsip-prinsip, asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan krisis dalam koperasi itu sendiri. Hemat saya dengan mengikuti semua nilai-nilai, prinsip-prinsip dan asas-asas koperasi maka banyak masyarakat yang akan bergabung dalam koperasi dan masyarakat atau anggota yang telah bergabung dalam koperasi tidak akan meninggalkan koperasi, karena mereka telah merasakan dan menikmati usaha yang telah mereka bangun melalui organisasi koperasi.

### **5.2.2 Masyarakat**

Masyarakat diharapkan untuk bergabung dalam koperasi, secara khususnya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Koperasi akan membantu masyarakat dengan mengajarkan hidup hemat, mengajarkan cara menabung uang dengan baik dan mengembangkan keterampilan dengan maksud untuk menolong diri sendiri yang diwarnai dengan rasa kekeluargaan dan kerja sama. Masyarakat diharapkan agar tidak salah memilih organisasi ekonomi yang bisa saja mencari

keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan agar masyarakat bisa bergabung dalam koperasi dan berpartisipasi yang penuh untuk menolong diri mereka sendiri melalui organisasi koperasi.

### 5.2.3 Lembaga Pemerintah

Peran pemerintah di tingkat daerah maupun nasional dalam mendukung koperasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari organisasi koperasi. Pemerintah di Indonesia di harapkan terus memperhatikan organisasi koperasi serta peduli terhadap perkembangan koperasi. Koperasi berusaha untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah mesti bekerja sama dengan koperasi untuk mengatasi masalah kemiskinan sehingga anggota koperasi yang sudah masuk dalam koperasi mampu memberdayakan dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah. Bentuk partisipasi dari pemerintah dalam mendukung kemajuan dari koperasi tersebut pemerintah harus menciptakan Undang-Undang yang melindungi koperasi dari segala ancaman. Memudahkan koperasi dalam melayani anggota-anggota koperasi serta membantu koperasi dengan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas guna untuk melancarkan pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. KAMUS DAN DOKUMEN

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XIV, Pasal 33.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Bab 1, Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*, Bab 1, Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dalam Pasal 45.

### II. BUKU

Achmaliadi, Restu dkk. *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2010.

Anoraga, Pandji dan Widiyanti, Ninik. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Baidhaw, Zakiyuddin. *Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neoliberal*. LP2M: Salatiga, 2015.

Budi, Paul Kleden, *Koperasi Kredit Pelembagaan Semangat Kekeluargaan Membebaskan*, dalam Mikhael Hongkoda Jawa, dkk (ed). *Koperasi Kredit Dialog Kehidupan*. Maumere: Ledalero, 2022.

Darmawan, Akhmad dan Totok Haryanto. *Koperasi Perkembangan dan Perspektifnya Dalam Islam*. UM Purwokerto Press : Purwokerto, 2020.

Efendi, Ahmad Zarkasi dkk. *Demokrasi Ekonomi*. Malang: Program Sekolah Demokrasi, 2012.

Elvis, Juliana Lumbantobing dan Simangunsong, Ridhon. *Ekonomi Koperasi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi, 2022.

Francis Wahono. *Kooperasi Kredit (Credit Union) Daulat Rakyat*. Jakarta: Kompas, 2021.

Hasmawati, Fifi. *Manajemen Koperasi*. Medan: Perpustakaan Nasional KDT, 2013.

- Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina, 2008.
- Hendar, dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2005.
- Itang. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.
- Lan, Thung Ju, ed. *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Pedesaan*. Jakarta: LIPI Press, 2019.
- Manta, Budi Arif. *Pembudidayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Oktober 2019.
- Monti, Usman. *Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta: Interpena, 2016.
- Munzir, Erman Dan Azis Syamsuddin. *Ekonomi Kerakyatan Dalam Diskusi Dua Generasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020.
- Mutiullah dan Ichwan, Nur Moch. Agama, Filsafat dan Kemiskinan, dalam Musahadi. *Kemiskinan di Negeri Makmur, Akar Kebijakan dan Tantangan*. Yogyakarta: KDT, 2015.
- Nasution, Muslimin. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian, 2008.
- Perkasa, Ripho Delzy. *Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020*. Modul Ekonomi Koperasi, 2020.
- Pujiyono. *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah di Indonesia*. Solo: CV. Indotama Solo, 2015.
- Purwantini, Kasih. *Akuntansi Koperasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Sagir, Soeharsono dkk. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009.
- Setiawan, Dani. Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang, dalam Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta selatan: AIFIS, 2014.
- Suratman, Maman. *Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi*. IKOPIN, 2014.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.



Watarti, Sri dkk, ed. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: 2007.

Woeryanto. *Koperasi Kredit Untuk Anda*. Jakarta: Bekatiga Indonesia, 2004.

Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Politik Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris*. Malang: Intrans Publishing, 2020.

### **III. JURNAL DAN ARTIKEL**

Adawiyah, Sa'diyah El, "Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya". *Jurnal Khidmat Sosial*. Vol. 1. No. 1, April 2020.

Astiti, Ni Nyoman Adi, "Tanggungjawab Pengurus Terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Koperasi". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 1. No. 1, Maret, 2016.

Choiriyah, "Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II". *Jurnal Islamik Banking*. Vol.3, No. 2, Februari 2018.

Erwan Agus Purwanto, "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol.10. No. 3, Maret 2007.

Hapsari, Dwi Ratna Indri, "Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Tinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 26. No. 2, September-Februari 2019.

Imanto, Rahmat Maya Panorama dan Rinol Sumantri, "Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Selatan". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11. No. 2, 2020.

Ismail, Muhammad. "Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Provinsi Papua Development Strategies In Papua Economic Democracy". *Jurnal Bina Praja*. Vol. 7 No. 3, September 2015.

Itang, "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan". *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Vol. 16. No. 1, Januari-Juni 2015.

Kader, Mukhtar Abdul, "Peran UMKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan" *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. Vol. 8. No.1, April 2018.

Maridjo, Herry, Mudayen dan Alex Kahu Lantum, "Analisis Tingkat Kemiskinan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 2. No. 1, April 2013.

- Pinagkaan, Nelly, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 3. No. 5, Juli, 2015.
- Pulungan, Sofyan, “Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi Dalam Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta”. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 12. No. 1, April, 2019.
- Rama, Kusuma Eka dan Oktayani, Dewi, “Pengaruh Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa”. *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 1 No. 2, Oktober 2020.
- Rini, Ayu Setyo dan Lilik Sugiharti, “Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. Vol. 1. No. 2, Desember 2016.
- Riwayadi Eko, “Analisis Paradigma Perusahaan Berbasis Ekonomi Pancasila Di Indonesia”. *Journal, Innovation, Research, Knowledge*. Vol. 1 No. 5, Oktober 2021.
- Rompas, Wensy, “People Centered Economic Developing In Indonesian East Region In The Connection Of Economic And Tourism Sector Acceleration In North Sulawesi: A Literature Study”. *Jurnal EMBA*. Vol. 6 No. 4, September 2018.
- Saragih, Julia Panglima, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Juni 2015.
- Sitepu, Camellia Fanny. “Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia”. *Jurnal Niagawan*, vol. 7, No.2, Juli 2018.
- Swasono, Sri-Edi, Communication: “Kebangsaan dan Kerakyatan Doktrin Pembangunan Nasional Indonesia”. *Jurnal of Social Welfare*. Vol. 1. No. 1, Januari 2014.
- Wardhani, Eka Cahya, “Konsep Usaha Bersama Dalam Koperasi Menurut Ari-Edi-Swasono Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah”. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*. No.7. Vol. 2, Desember 2018.
- Warsono, “Pemahaman Filosofi Sejarah dan Ideologi Koperasi Memperkokoh Serta Memperkuat Ketahanan Pengelolaan Koperasi Sesuai Dengan Jati Dirinya”. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 3. No. 1, Semarang Februari 2011.

#### **IV. MANUSKRIP**

Afandi, Heribertus. “Koperasi Kredit Sebagai Kekuatan Ekonomi Kerakyatan: Suatu Usaha Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Skripsi, Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere 2009.

Ernawati. “Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia Tahun 2005 -2009”. Skripsi Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Harsono, Hari, “Kemiskinan di Perkotaan”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Nuryanti, Evin dan Kirwani, “Manfaat Kualitas Layanan Koperasi dalam Mewujudkan Partisipasi Anggota dan Perkembangan Usaha Koperasi As-Sakinah Sidoarjo” Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Paket Informasi Dasar. t.p., Lembaga Penelitian SMERU, 2001.

Podes. Valerianus. “Usaha Koperasi Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Relasi Dengan Ajaran Sosial Gereja”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2021.

Sagimund, “*Koperasi Indonesia*”. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **V. INTERNET**

Almadinah Putri Brilian. “Orang Miskin di RI Naik Jadi 26,36 Juta, Ternyata Ini Biang Keroknya”. *Detikfinance Selasa 17 Januari 2023* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-65200034/orang-miskin-di-ri-naik-jadi-2636-juta-ternyata-ini-biang-keroknya>.

Ahmad, “Pengertian Kemiskinan: Jenis, Penyebab Dan Dampaknya” dalam Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/kemiskinan/>, diakses pada 5 Oktober 2022.

Buka Usaha ByNgeriHukum.ID, “Mengenal Jenis-Jenis Koperasi” dalam <https://bukausaha.ngertihukum.id/mengenal-jenis-jenis-koperasi/>, diakses pada 21 september 2022.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten dalam Koperasi dan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, <https://dpmpstp.bantenprov.go.id/Berita/topic/393>, diakses pada 24 Oktober 2022.

Koperasi Indonesia, “Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia, Ketahui Kategorinya”, dalam Liputan 6.com, <https://cuharapankita.com/berita/jenisjenis-koperasi-di-indonesia-ketahui-kategorinya>, diakses pada 21 September 2022.

Zakawali, Gifari “Tiga Contoh Serba Usaha dan Fungsinya”, dalam, <https://store.sirclo.com/blog/koperasi-serba-usaha/>. diakses pada 18 November 2022.

<https://text-id.123dok.com/document/dzx28e54q-tujuan-pendidikan-perkoperasian-pendidikan-perkoperasian.html>., diakses pada 26 Oktober 2022.

<https://enterpreneurcamp.id/apa-itu-koperasi-simpan-pinjam/>, diakses pada 21 Februari 2023.

## **VI. WAWANCARA**

Noe, Yoskarmus. Wawancara melalui Telepon, Anggota Koperasi *Ca Nai Mano*, pada 24 Februari 2023.